



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 438 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian perhitungan alokasi dasar secara merata pada setiap Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran Dana Desa yang akan diterima, maka peraturan Bupati Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 438 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 438) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (4) Formula pengalokasian untuk Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa.
- (6) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I Tahun Anggaran 2023;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023; dan
 - c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

- (2) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diikutsertakan dalam penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang kriteria pada ayat (1) huruf a dan huruf b terpenuhi serta tidak terdapat keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b, terdiri atas kategori kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 - a. kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa, dan
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.
- (5) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);

- c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (6) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (7) Kategori penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022;

- b. Desa Digital tahun 2023;
 - c. Desa *One Village One Product* tahun 2023;
 - d. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022;
 - e. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023; dan
 - f. Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023.
- (8) Data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut:
- a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2023 dari Bupati;
 - c. data Desa sudah salur Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - d. data Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - e. data nilai indeks Desa membangun tahun 2022 dan tahun 2023 bersumber dari Kementerian

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. data kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - g. data kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - h. data kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;
 - i. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - j. data APBDes tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - k. data kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian Keuangan;
 - m. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

- n. data penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- o. data Desa Digital tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- p. data Desa *One Village One Product* tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- q. data pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- r. data Desa percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- s. data Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.

- (3) Penetapan jumlah Desa penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

| Jumlah Desa | Persentase Jumlah Desa Penerima Tambahan Dana Desa |
|----------------|--|
| Lebih dari 249 | 19% (sembilan belas persen) |

- (4) Peringkat Desa per kabupaten dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai indikator dengan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- (7) Besaran tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

| Kelengkapan Data Keuangan Desa | Besaran alokasi kinerja per Desa |
|--|---|
| Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi | Rp.116.368.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) |
| Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi | Rp128.005.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima riburupiah) |
| Hanya mengirimkan Data APBDes | Rp133.823.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) |
| Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi | Rp139.642.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) |

- (8) Desa yang menerima alokasi untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga merupakan Desa yang menerima salah satu penghargaan nasional dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (9) Dalam hal Desa mendapatkan lebih dari 1 (satu) penghargaan untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), kepada Desa tersebut hanya menerima alokasi untuk 1 (satu) jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (11) Dalam hal terdapat sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa, sisa penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Desa pada kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil dengan kriteria:
- a. memiliki jumlah Desa penerima tambahan Dana Desa yang dapat membagi habis sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa; dan
 - b. memiliki rata-rata perubahan indeks Desa membangun tertinggi.
- (12) Dalam hal kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak memenuhi kriteria, sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa diberikan kepada kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil selanjutnya.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Oktober; dan
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari

Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun anggaran berjalan;

b. tahap II paling lambat tanggal 29 September tahun anggaran berjalan; dan

c. batas waktu untuk tahap III mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.

(4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022

selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.

- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh

pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
- (4) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk:

- a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
- b. penanganan bencana alam dan non-alam.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (12) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (5) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pem bayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (9), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

- (11) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat se bagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (13) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (14) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

9. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Sisa alokasi BLT Desa dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 76 TAHUN 202
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 438 TAHUN 2022 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK
 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | PAGU DANA DESA PER DESA (Rp) |
|------------|------------------|--------------------|---|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| 1 | MALINGPING | CILANGKAHAN | 832.561.000 |
| 2 | MALINGPING | PAGELARAN | 1.078.644.000 |
| 3 | MALINGPING | SUKARAJA | 922.651.000 |
| 4 | MALINGPING | MALINGPING UTARA | 845.309.000 |
| 5 | MALINGPING | BOLANG | 1.050.961.000 |
| 6 | MALINGPING | CIPEUNDEUY | 1.221.478.000 |
| 7 | MALINGPING | RAHONG | 1.021.785.000 |
| 8 | MALINGPING | KADUJAJAR | 1.063.776.000 |
| 9 | MALINGPING | KERSARATU | 1.253.057.000 |
| 10 | MALINGPING | MALINGPING SELATAN | 759.675.000 |
| 11 | MALINGPING | SUMBERWARAS | 1.267.494.000 |
| 12 | MALINGPING | SUKAMANAH | 1.019.909.000 |
| 13 | MALINGPING | SENGHATI | 988.461.000 |
| 14 | MALINGPING | SANGIANG | 1.172.556.000 |
| 15 | PANGGARANGAN | PANGGARANGAN | 1.119.506.000 |
| 16 | PANGGARANGAN | JATAKE | 900.468.000 |
| 17 | PANGGARANGAN | SOGONG | 1.255.747.000 |

| | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 18 | PANGGARANGAN | CIMANDIRI | 1.100.447.000 |
| 19 | PANGGARANGAN | GUNUNGGEDE | 1.032.561.000 |
| 20 | PANGGARANGAN | SITUREGEN | 965.652.000 |
| 21 | PANGGARANGAN | MEKARJAYA | 1.094.228.000 |
| 22 | PANGGARANGAN | SINDANGRATU | 1.302.690.000 |
| 23 | PANGGARANGAN | HEGARMANAH | 778.812.000 |
| 24 | PANGGARANGAN | SUKAJADI | 932.466.000 |
| 25 | PANGGARANGAN | CIBARENGKOK | 993.169.000 |
| 26 | BAYAH | BAYAH BARAT | 885.782.000 |
| 27 | BAYAH | SAWARNA | 1.128.500.000 |
| 28 | BAYAH | CIDIKIT | 1.261.418.000 |
| 29 | BAYAH | SUWAKAN | 848.619.000 |
| 30 | BAYAH | CIMANCAK | 1.101.258.000 |
| 31 | BAYAH | DARMASARI | 783.146.000 |
| 32 | BAYAH | BAYAH TIMUR | 901.201.000 |
| 33 | BAYAH | CISUREN | 837.567.000 |
| 34 | BAYAH | PASIRGOMBONG | 742.174.000 |
| 35 | BAYAH | SAWARNA TIMUR | 778.481.000 |
| 36 | BAYAH | PAMUBULAN | 1.077.875.000 |
| 37 | CIPANAS | CIPANAS | 1.247.083.000 |
| 38 | CIPANAS | GIRILAYA | 1.235.289.000 |
| 39 | CIPANAS | MALANGSARI | 1.049.858.000 |
| 40 | CIPANAS | BINTANGRESMI | 917.164.000 |
| 41 | CIPANAS | TALAGAHYANG | 747.736.000 |
| 42 | CIPANAS | LUHURJAYA | 1.136.852.000 |
| 43 | CIPANAS | HAURGAJRUG | 1.075.621.000 |
| 44 | CIPANAS | GIRIHARJA | 988.007.000 |
| 45 | CIPANAS | SUKASARI | 1.195.824.000 |
| 46 | CIPANAS | JAYAPURA | 1.470.513.000 |
| 47 | CIPANAS | SIPAYUNG | 1.096.130.000 |
| 48 | CIPANAS | BINTANGSARI | 783.353.000 |

| | | | |
|----|-------------|---------------|---------------|
| 49 | CIPANAS | PASIRHAUR | 1.208.723.000 |
| 50 | CIPANAS | HARUMSARI | 1.107.520.000 |
| 51 | MUNCANG | PASIREURIH | 826.010.000 |
| 52 | MUNCANG | CIMINYAK | 783.652.000 |
| 53 | MUNCANG | MUNCANG | 1.028.284.000 |
| 54 | MUNCANG | LEUWICOO | 832.529.000 |
| 55 | MUNCANG | SINDANGWANGI | 1.030.181.000 |
| 56 | MUNCANG | CIKARANG | 1.284.052.000 |
| 57 | MUNCANG | SUKANAGARA | 1.094.272.000 |
| 58 | MUNCANG | PASIRNANGKA | 969.487.000 |
| 59 | MUNCANG | JAGARAKSA | 932.466.000 |
| 60 | MUNCANG | TANJUNGWANGI | 1.189.065.000 |
| 61 | MUNCANG | MEKARWANGI | 874.981.000 |
| 62 | MUNCANG | GIRIJAGABAYA | 1.125.410.000 |
| 63 | LEUWIDAMAR | KANEKES | - |
| 64 | LEUWIDAMAR | CISIMEUT | 1.318.488.000 |
| 65 | LEUWIDAMAR | CIBUNGUR | 1.276.657.000 |
| 66 | LEUWIDAMAR | LEUWIDAMAR | 1.382.033.000 |
| 67 | LEUWIDAMAR | LEBAKPARAHANG | 1.070.057.000 |
| 68 | LEUWIDAMAR | SANGKANWANGI | 1.149.963.000 |
| 69 | LEUWIDAMAR | NAYAGATI | 1.269.762.000 |
| 70 | LEUWIDAMAR | BOJONGMENTENG | 1.137.723.000 |
| 71 | LEUWIDAMAR | MARGAWANGI | 895.010.000 |
| 72 | LEUWIDAMAR | WANTISARI | 1.131.021.000 |
| 73 | LEUWIDAMAR | JALUPANGMULYA | 1.509.664.000 |
| 74 | LEUWIDAMAR | CISIMEUT RAYA | 1.170.811.000 |
| 75 | BOJONGMANIK | BOJONGMANIK | 783.613.000 |
| 76 | BOJONGMANIK | HARJAWANA | 1.213.347.000 |
| 77 | BOJONGMANIK | KADURAHAYU | 1.032.982.000 |
| 78 | BOJONGMANIK | CIMAYANG | 1.103.832.000 |
| 79 | BOJONGMANIK | PARAKANBEUSI | 1.269.447.000 |

| | | | |
|-----|---------------|-------------------|---------------|
| 80 | BOJONGMANIK | KEBONCAU | 1.038.283.000 |
| 81 | BOJONGMANIK | MEKARMANIK | 1.045.824.000 |
| 82 | BOJONGMANIK | MEKAR RAHAYU | 995.745.000 |
| 83 | BOJONGMANIK | PASIRBITUNG | 917.350.000 |
| 84 | GUNUNGKENCANA | GUNUNGKENCANA | 1.131.892.000 |
| 85 | GUNUNGKENCANA | CIMANYANGRAY | 1.037.376.000 |
| 86 | GUNUNGKENCANA | GUNUNGKENDENG | 803.130.000 |
| 87 | GUNUNGKENCANA | CISAMPANG | 1.003.472.000 |
| 88 | GUNUNGKENCANA | CIGINGGANG | 1.111.187.000 |
| 89 | GUNUNGKENCANA | CIAKAR | 1.044.343.000 |
| 90 | GUNUNGKENCANA | CICARINGIN | 1.092.937.000 |
| 91 | GUNUNGKENCANA | BULAKAN | 1.228.240.000 |
| 92 | GUNUNGKENCANA | SUKANEGARA | 1.065.423.000 |
| 93 | GUNUNGKENCANA | BOJONGKONENG | 882.978.000 |
| 94 | GUNUNGKENCANA | KRAMATJAYA | 1.389.714.000 |
| 95 | GUNUNGKENCANA | TANJUNGSARI INDAH | 853.128.000 |
| 96 | BANJARSARI | KERTA | 1.094.479.000 |
| 97 | BANJARSARI | BOJONGJURUH | 1.183.595.000 |
| 98 | BANJARSARI | LEUWIIPUH | 967.133.000 |
| 99 | BANJARSARI | LEBAKKEUSIK | 1.155.092.000 |
| 100 | BANJARSARI | CILEGONGILIR | 1.002.794.000 |
| 101 | BANJARSARI | KEUSIK | 968.162.000 |
| 102 | BANJARSARI | CIBATURKEUSIK | 1.033.951.000 |
| 103 | BANJARSARI | KUMPAY | 950.382.000 |
| 104 | BANJARSARI | JALUPANGGIRANG | 1.141.446.000 |
| 105 | BANJARSARI | BENDUNGAN | 1.170.152.000 |
| 106 | BANJARSARI | KERTARAHARJA | 1.315.480.000 |
| 107 | BANJARSARI | CISAMPIH | 1.448.146.000 |
| 108 | BANJARSARI | GUNUNGSARI | 1.083.310.000 |
| 109 | BANJARSARI | TAMANSARI | 1.084.015.000 |
| 110 | BANJARSARI | CIDAHU | 868.966.000 |

| | | | |
|-----|------------|----------------|---------------|
| 111 | BANJARSARI | CIRUJI | 1.270.605.000 |
| 112 | BANJARSARI | KADUHAUK | 1.015.341.000 |
| 113 | BANJARSARI | LABANJAYA | 1.026.373.000 |
| 114 | BANJARSARI | UMBULJAYA | 1.395.954.000 |
| 115 | BANJARSARI | KERTARAHAYU | 1.048.915.000 |
| 116 | CILELES | PASINDANGAN | 1.114.980.000 |
| 117 | CILELES | PARUNGKUJANG | 1.629.550.000 |
| 118 | CILELES | CILELES | 881.449.000 |
| 119 | CILELES | CIKAREO | 1.110.118.000 |
| 120 | CILELES | CIPADANG | 1.448.751.000 |
| 121 | CILELES | GUMURUH | 1.274.864.000 |
| 122 | CILELES | PRABUGANTUNGAN | 1.241.265.000 |
| 123 | CILELES | DAROYON | 1.164.678.000 |
| 124 | CILELES | MARGAMULYA | 977.646.000 |
| 125 | CILELES | MEKARJAYA | 1.012.298.000 |
| 126 | CILELES | KUJANGSARI | 1.087.935.000 |
| 127 | CILELES | BANJARSARI | 1.367.810.000 |
| 128 | CIMARGA | SARAGENI | 1.409.722.000 |
| 129 | CIMARGA | GUNUNGANTEN | 1.028.435.000 |
| 130 | CIMARGA | SUDAMANIK | 1.076.915.000 |
| 131 | CIMARGA | TAMBAK | 1.359.691.000 |
| 132 | CIMARGA | CIMARGA | 976.577.000 |
| 133 | CIMARGA | KARYAJAYA | 1.157.568.000 |
| 134 | CIMARGA | MARGAJAYA | 1.445.617.000 |
| 135 | CIMARGA | JAYAMANIK | 1.171.722.000 |
| 136 | CIMARGA | MARGALUYU | 1.215.725.000 |
| 137 | CIMARGA | MARGATIRTA | 1.157.929.000 |
| 138 | CIMARGA | INTENJAYA | 1.342.794.000 |
| 139 | CIMARGA | MEKARJAYA | 1.054.794.000 |
| 140 | CIMARGA | JAYASARI | 792.077.000 |
| 141 | CIMARGA | GIRIMUKTI | 1.186.245.000 |

| | | | |
|-----|---------|----------------------|---------------|
| 142 | CIMARGA | SANGKANMANIK | 1.159.761.000 |
| 143 | CIMARGA | SANGIANGJAYA | 1.122.533.000 |
| 144 | CIMARGA | MEKARMULYA | 1.077.301.000 |
| 145 | SAJIRA | MARAYA | 1.667.254.000 |
| 146 | SAJIRA | SAJIRA | 1.057.655.000 |
| 147 | SAJIRA | SUKARAME | 1.021.295.000 |
| 148 | SAJIRA | CALUNGBUNGUR | 1.057.029.000 |
| 149 | SAJIRA | PARUNGSARI | 975.664.000 |
| 150 | SAJIRA | SINDANGSARI | 1.004.695.000 |
| 151 | SAJIRA | MEKARSARI | 1.200.549.000 |
| 152 | SAJIRA | SUKAMARGA | 1.056.707.000 |
| 153 | SAJIRA | PAJAGAN | 1.339.748.000 |
| 154 | SAJIRA | SUKAJAYA | 1.072.963.000 |
| 155 | SAJIRA | SAJIRA MEKAR | 1.044.223.000 |
| 156 | SAJIRA | PAJA | 766.366.000 |
| 157 | SAJIRA | MARGALUYU | 1.273.979.000 |
| 158 | SAJIRA | BUNGURMEKAR | 810.215.000 |
| 159 | SAJIRA | CIUYAH | 1.072.087.000 |
| 160 | MAJA | TANJUNGSARI | 1.140.204.000 |
| 161 | MAJA | MAJA | 1.857.628.000 |
| 162 | MAJA | SANGIANG | 888.499.000 |
| 163 | MAJA | BINONG | 1.215.746.000 |
| 164 | MAJA | GUBUGAN CIBEUREUM | 863.025.000 |
| 165 | MAJA | MEKARSARI | 1.017.548.000 |
| 166 | MAJA | PADASUKA | 945.398.000 |
| 167 | MAJA | CURUGBADAK | 926.759.000 |
| 168 | MAJA | SINDANGMULYA | 1.066.046.000 |
| 169 | MAJA | CILANGKAP | 930.343.000 |
| 170 | MAJA | PASIRKEMBANG | 937.757.000 |
| 171 | MAJA | PASIRKECAPI | 1.109.769.000 |

| | | | |
|-----|---------------|------------------------|---------------|
| 172 | MAJA | BUYUT MEKAR | 897.650.000 |
| 173 | MAJA | MAJA BARU | 809.084.000 |
| 174 | RANGKASBITUNG | PASIRTANJUNG | 1.201.671.000 |
| 175 | RANGKASBITUNG | CITERAS | 1.378.169.000 |
| 176 | RANGKASBITUNG | NAMENG | 938.407.000 |
| 177 | RANGKASBITUNG | KOLELET WETAN | 856.638.000 |
| 178 | RANGKASBITUNG | JATIMULYA | 903.327.000 |
| 179 | RANGKASBITUNG | MEKARSARI | 903.244.000 |
| 180 | RANGKASBITUNG | PABUARAN | 917.341.000 |
| 181 | RANGKASBITUNG | RANGKASBITUNG TIMUR | 1.099.811.000 |
| 182 | RANGKASBITUNG | SUKAMANA | 1.146.546.000 |
| 183 | RANGKASBITUNG | CIMANGEUNTEUNG | 912.489.000 |
| 184 | RANGKASBITUNG | NARIMBANG MULIA | 1.029.129.000 |
| 185 | WARUNGGUNUNG | SUKARENDAH | 1.217.668.000 |
| 186 | WARUNGGUNUNG | WARUNGGUNUNG | 861.426.000 |
| 187 | WARUNGGUNUNG | CIBUAH | 883.644.000 |
| 188 | WARUNGGUNUNG | PASIR TANGKIL | 861.077.000 |
| 189 | WARUNGGUNUNG | BAROS | 849.404.000 |
| 190 | WARUNGGUNUNG | BANJARSARI | 1.015.016.000 |
| 191 | WARUNGGUNUNG | PADASUKA | 1.158.206.000 |
| 192 | WARUNGGUNUNG | SUKARAJA | 1.132.677.000 |
| 193 | WARUNGGUNUNG | JAGABAYA | 1.002.077.000 |
| 194 | WARUNGGUNUNG | SELARAJA | 901.463.000 |
| 195 | WARUNGGUNUNG | CEMPAKA | 916.173.000 |
| 196 | WARUNGGUNUNG | SINDANGSARI | 1.212.112.000 |
| 197 | CIJAKU | MEKARJAYA | 774.878.000 |
| 198 | CIJAKU | CIPALABUH | 1.314.431.000 |
| 199 | CIJAKU | CIJAKU | 994.825.000 |
| 200 | CIJAKU | CIBEUREUM | 1.046.471.000 |
| 201 | CIJAKU | CIAPUS | 991.425.000 |

| | | | |
|-----|---------|-----------------|---------------|
| 202 | CIJAKU | KANDANGSAPI | 1.301.651.000 |
| 203 | CIJAKU | CIHujan | 1.027.523.000 |
| 204 | CIJAKU | CIMENGA | 1.082.073.000 |
| 205 | CIJAKU | KAPUNDUHAN | 1.043.659.000 |
| 206 | CIJAKU | SUKASENANG | 1.029.725.000 |
| 207 | CIKULUR | ANGGALAN | 1.110.615.000 |
| 208 | CIKULUR | MUNCANGKOPONG | 865.085.000 |
| 209 | CIKULUR | SUKAHARJA | 1.086.591.000 |
| 210 | CIKULUR | TAMANJAYA | 870.255.000 |
| 211 | CIKULUR | CIGOONG UTARA | 1.261.694.000 |
| 212 | CIKULUR | MUARADUA | 1.146.142.000 |
| 213 | CIKULUR | CIKULUR | 1.292.624.000 |
| 214 | CIKULUR | CURUGPANJANG | 1.176.633.000 |
| 215 | CIKULUR | CIGOONG SELATAN | 811.055.000 |
| 216 | CIKULUR | SUMURBANDUNG | 880.126.000 |
| 217 | CIKULUR | PARAGE | 1.197.422.000 |
| 218 | CIKULUR | SUKADAYA | 1.186.318.000 |
| 219 | CIKULUR | PASIRGINTUNG | 1.047.154.000 |
| 220 | CIBADAK | TAMBAKBAYA | 1.412.011.000 |
| 221 | CIBADAK | KADUAGUNG TIMUR | 1.138.368.000 |
| 222 | CIBADAK | PANANCANGAN | 829.420.000 |
| 223 | CIBADAK | CIBADAK | 985.955.000 |
| 224 | CIBADAK | ASEM | 845.540.000 |
| 225 | CIBADAK | CISANGU | 1.124.706.000 |
| 226 | CIBADAK | KADUAGUNG BARAT | 918.336.000 |
| 227 | CIBADAK | BOJONGCAE | 989.802.000 |
| 228 | CIBADAK | MALABAR | 1.109.081.000 |
| 229 | CIBADAK | PASAR KEONG | 915.771.000 |
| 230 | CIBADAK | BOJONG LELES | 1.137.391.000 |
| 231 | CIBADAK | CIMENTENG JAYA | 856.151.000 |
| 232 | CIBADAK | MEKAR AGUNG | 888.680.000 |

| | | | |
|-----|-----------|------------------|---------------|
| 233 | CIBADAK | ASEM MARGALUYU | 1.212.071.000 |
| 234 | CIBADAK | KADUAGUNG TENGAH | 852.471.000 |
| 235 | CIBEBER | CIBEBER | 1.219.019.000 |
| 236 | CIBEBER | CITOREK TENGAH | 825.149.000 |
| 237 | CIBEBER | CISUNGSANG | 739.098.000 |
| 238 | CIBEBER | KUJANGJAYA | 755.863.000 |
| 239 | CIBEBER | KUJANGSARI | 808.361.000 |
| 240 | CIBEBER | NEGLASARI | 927.244.000 |
| 241 | CIBEBER | MEKARSARI | 751.087.000 |
| 242 | CIBEBER | CIKOTOK | 751.983.000 |
| 243 | CIBEBER | SUKAMULYA | 800.164.000 |
| 244 | CIBEBER | CITOREK TIMUR | 1.166.386.000 |
| 245 | CIBEBER | WARUNGBANTEN | 839.014.000 |
| 246 | CIBEBER | HEGARMANAH | 902.532.000 |
| 247 | CIBEBER | SITUMULYA | 854.541.000 |
| 248 | CIBEBER | CITOREK KIDUL | 951.595.000 |
| 249 | CIBEBER | CIKADU | 915.868.000 |
| 250 | CIBEBER | SIRNAGALIH | 846.864.000 |
| 251 | CIBEBER | CIHAMBALI | 981.795.000 |
| 252 | CIBEBER | CITOREK BARAT | 805.421.000 |
| 253 | CIBEBER | GUNUNGWANGUN | 815.600.000 |
| 254 | CIBEBER | WANASARI | 746.477.000 |
| 255 | CIBEBER | CITOREK SABRANG | 1.191.003.000 |
| 256 | CIBEBER | CIHERANG | 826.230.000 |
| 257 | CILOGRANG | CILOGRANG | 875.100.000 |
| 258 | CILOGRANG | CIBARENO | 900.375.000 |
| 259 | CILOGRANG | CIKAMUNDING | 1.212.699.000 |
| 260 | CILOGRANG | CIJENGKOL | 1.223.801.000 |
| 261 | CILOGRANG | PASIRBUNGUR | 1.054.731.000 |
| 262 | CILOGRANG | LEBAKTIPAR | 910.628.000 |
| 263 | CILOGRANG | CIKATOMAS | 881.208.000 |

| | | | |
|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 264 | CILOGRANG | GIRIMUKTI | 1.092.127.000 |
| 265 | CILOGRANG | CIREUNDEU | 984.755.000 |
| 266 | CILOGRANG | GUNUNGBATU | 812.779.000 |
| 267 | WANASALAM | WANASALAM | 1.293.943.000 |
| 268 | WANASALAM | BEJOD | 1.254.116.000 |
| 269 | WANASALAM | CILANGKAP | 1.280.404.000 |
| 270 | WANASALAM | CIPEUCANG | 1.032.346.000 |
| 271 | WANASALAM | MUARA | 1.218.502.000 |
| 272 | WANASALAM | PARUNGPANJANG | 1.337.536.000 |
| 273 | WANASALAM | CIKEUSIK | 1.210.470.000 |
| 274 | WANASALAM | KATAPANG | 1.237.603.000 |
| 275 | WANASALAM | CISARAP | 1.129.750.000 |
| 276 | WANASALAM | SUKATANI | 1.626.755.000 |
| 277 | WANASALAM | CIPEDANG | 998.515.000 |
| 278 | WANASALAM | PARUNGSARI | 1.212.796.000 |
| 279 | WANASALAM | KARANGPAMINDANGAN | 1.046.915.000 |
| 280 | SOBANG | CIPARASI | 993.577.000 |
| 281 | SOBANG | SOBANG | 839.741.000 |
| 282 | SOBANG | SUKAJAYA | 752.924.000 |
| 283 | SOBANG | SINDANGLAYA | 853.433.000 |
| 284 | SOBANG | SUKAMAJU | 874.245.000 |
| 285 | SOBANG | HARIANG | 1.458.630.000 |
| 286 | SOBANG | MAJASARI | 899.102.000 |
| 287 | SOBANG | SINAR JAYA | 938.332.000 |
| 288 | SOBANG | CIROMPANG | 1.070.202.000 |
| 289 | SOBANG | SUKARESMI | 979.185.000 |
| 290 | CURUG BITUNG | GURADOG | 1.157.645.000 |
| 291 | CURUG BITUNG | CURUGBITUNG | 852.557.000 |
| 292 | CURUG BITUNG | CANDI | 893.468.000 |
| 293 | CURUG BITUNG | MAYAK | 748.391.000 |
| 294 | CURUG BITUNG | CIPINING | 977.701.000 |

| | | | |
|-----|--------------|-----------------|---------------|
| 295 | CURUG BITUNG | CILAYANG | 922.567.000 |
| 296 | CURUG BITUNG | CIBURUY | 1.123.295.000 |
| 297 | CURUG BITUNG | SEKARWANGI | 1.165.426.000 |
| 298 | CURUG BITUNG | CIDADAP | 932.953.000 |
| 299 | CURUG BITUNG | LEBAKASIH | 755.818.000 |
| 300 | KALANGANYAR | KALANGANYAR | 863.912.000 |
| 301 | KALANGANYAR | PASIRKUPA | 1.181.457.000 |
| 302 | KALANGANYAR | CILANGKAP | 981.565.000 |
| 303 | KALANGANYAR | AWEH | 882.653.000 |
| 304 | KALANGANYAR | SANGIANGTANJUNG | 1.377.240.000 |
| 305 | KALANGANYAR | SUKAMEKARSARI | 1.043.859.000 |
| 306 | KALANGANYAR | CIKATAPIS | 834.810.000 |
| 307 | LEBAKGEDONG | BANJARIRIGASI | 1.032.418.000 |
| 308 | LEBAKGEDONG | CILADAEUN | 852.774.000 |
| 309 | LEBAKGEDONG | LEBAKGEDONG | 844.306.000 |
| 310 | LEBAKGEDONG | BANJARSARI | 1.024.298.000 |
| 311 | LEBAKGEDONG | LEBAKSITU | 836.325.000 |
| 312 | LEBAKGEDONG | LEBAKSANGKA | 845.077.000 |
| 313 | CIHARA | PANYAUNGAN | 858.059.000 |
| 314 | CIHARA | CIHARA | 849.931.000 |
| 315 | CIHARA | CIPARAHU | 994.227.000 |
| 316 | CIHARA | PONDOKPANJANG | 965.775.000 |
| 317 | CIHARA | CITEUPUSEUN | 912.381.000 |
| 318 | CIHARA | LEBAKPEUNDEUY | 779.810.000 |
| 319 | CIHARA | MEKARSARI | 938.488.000 |
| 320 | CIHARA | KARANGKAMULYAN | 1.133.895.000 |
| 321 | CIHARA | BARUNAI | 1.038.630.000 |
| 322 | CIRINTEN | DATARCAE | 882.043.000 |
| 323 | CIRINTEN | CIRINTEN | 1.097.672.000 |
| 324 | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | 825.928.000 |
| 325 | CIRINTEN | KADUDAMAS | 838.805.000 |

| | | | |
|---------------|------------|--------------|------------------------|
| 326 | CIRINTEN | BADUR | 899.479.000 |
| 327 | CIRINTEN | PARAKANLIMA | 1.244.443.000 |
| 328 | CIRINTEN | NANGGERANG | 1.158.780.000 |
| 329 | CIRINTEN | CEMPAKA | 989.727.000 |
| 330 | CIRINTEN | KAROYA | 775.844.000 |
| 331 | CIRINTEN | CIBARANI | 850.691.000 |
| 332 | CIGEMBLONG | PEUCANGPARI | 1.541.937.000 |
| 333 | CIGEMBLONG | CIBUNGUR | 1.077.340.000 |
| 334 | CIGEMBLONG | MUGIJAYA | 1.088.965.000 |
| 335 | CIGEMBLONG | CIKATE | 1.155.791.000 |
| 336 | CIGEMBLONG | CIGEMBLONG | 1.209.809.000 |
| 337 | CIGEMBLONG | CIKADONGDONG | 1.059.081.000 |
| 338 | CIGEMBLONG | CIKARET | 969.630.000 |
| 339 | CIGEMBLONG | WANGUNJAYA | 1.176.715.000 |
| 340 | CIGEMBLONG | CIKARATUAN | 1.032.776.000 |
| JUMLAH | | | 354.640.034.000 |

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009